

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendidikan Nonformal

a. Pengertian Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal dapat dijadikan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah.

Coombs dan Ahmed (1985: 23) menyatakan bahwa pendidikan nonformal adalah setiap jenis kegiatan pendidikan yang terorganisasi dan diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun bagian dari kegiatan yang luas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada sasaran atau warga belajar tertentu dalam mencapai tujuan belajar yang diharapkan.

Marzuki (2012: 137) menyatakan bahwa pendidikan nonformal sebagai proses belajar yang terselenggara di luar dari sistem persekolahan dan memiliki kedudukan penting dalam melayani sasaran pendidikan tertentu dengan proses belajar tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendidikan nonformal lebih humanistik artinya pendidikan ini lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Syamsi (2010: 59) menyatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan instrumen untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam mencapai pengembangan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas maka pendidikan nonformal adalah pendidikan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 13 menerangkan bahwa terdapat tiga jalur pendidikan yang ada di Indonesia yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Ketiga jalur pendidikan tersebut memiliki kedudukan yang sama.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan yang berlangsung diluar pendidikan formal, dan dapat terselenggara secara terstruktur dan berjenjang, serta tidak mengenal batasan usia. Artinya, pendidikan nonformal dapat berlangsung seumur hidup dan terealisasi dilingkungan masyarakat. Pendidikan nonformal dalam penelitian ini yaitu terletak pada wisata edukasi yang diselenggarakan oleh Paguyuban TEGAR Desa Wisata Gamplong kepada pengunjung wisata baik dari kalangan instansi sekolah maupun kalangan masyarakat yang ingin belajar menenun. Edukasi dalam hal pelatihan memproduksi kerajinan tenun yang difasilitasi oleh Paguyuban TEGAR dan UKM kerajinan tenun yang ada di Desa Wisata Gamplong..

Pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) merupakan suatu mekanisme yang dapat memberikan peluang kepada setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan melalui proses belajar sepanjang hayat. Munculnya paradigma pendidikan berbasis masyarakat ini dipicu oleh

arus modernisasi yang menginginkan terciptanya demokratisasi dalam setiap dimensi kehidupan manusia tanpa terkecuali dalam bidang pendidikan. Sehingga pendidikan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu melalui sistem pendidikan nonformal.

Freire (2013: 190) dalam buku “Pendidikan Kaum Tertindas” menyatakan bahwa teori-teori tindakan dialogis dikenal istilah-istilah seperti kerja sama, persatuan untuk pembebasan, organisasi, dan sintesa kebudayaan merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan nonformal menjadi langkah kolaboratif yang melibatkan partisipasi dari masyarakat, pemerintah dan penggiat pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan aktivitas pendidikan. Sehingga melalui usaha kolaboratif maka masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan.

Proses pendidikan nonformal yang kolaboratif di dalam penelitian ini yaitu terletak pada kolaborasi antara masyarakat dengan instansi pemerintah. Pengelola Paguyuban TEGAR bekerja sama dengan Dinas Pariwisata D.I Yogyakarta dan Dinas Koperasi dan UKM D.I Yogyakarta untuk memfasilitasi para pengelola dan pelaksana program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong. Bentuk pendidikan nonformal yang terselenggara yaitu kegiatan pelatihan (*training*) kepada pemandu wisata untuk membekali

pengelola program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong menjadi organisasi pembelajar di masyarakat. Kemudian, pendidikan nonformal untuk para pengerajin tenun supaya dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki terutama kemampuan dalam hal memproduksi inovasi produk kerajinan tenun yang berkualitas.

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nonformal

Tujuan pendidikan nonformal pada dasarnya ialah untuk memenuhi kebutuhan belajar dari setiap individu manusia, memberikan pendidikan yang tidak dapat diperoleh dari pendidikan formal, dan mewujudkan proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat.

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 26 ayat (1-7) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nonformal yaitu:

- 1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- 2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- 3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- 4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- 5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- 7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

Hasil penelitian Soedarwo et al. (2017: 102) menyatakan bahwa Pendidikan nonformal bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan potensinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh

karena itu di desa ini telah dilaksanakan program pemberdayaan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan yaitu pelatihan pembuatan peraturan desa, pelatihan pembangunan karakter menjaga lingkungan bersih-sehat dan pengadaan fasilitas umum serta pelatihan produksi minuman olahan dari hasil pertanian lokal (terong belanda).

Pendidikan nonformal memiliki fungsi yang sama dengan pendidikan formal yaitu pembangunan nasional. Perbedaannya terletak pada proses pelaksanaan pendidikan, dan tujuan yang lebih spesifik yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan warga belajar.

Hasil penelitian Kedrayate (2012: 15) menyatakan bahwa pendidikan nonformal sangat relevan dan memberikan kontribusi yang signifikan atas perkembangan pembangunan di banyak negara. Pendidikan nonformal mampu memenuhi atau melengkapi kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi di dalam pendidikan formal yang seiring dengan perubahan-perubahan sosial.

Berdasarkan keterangan di atas tujuan dan fungsi pendidikan nonformal dalam penelitian ini yaitu terletak pada proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan kepada pengelola dan pelaksana program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif, kreatif, dan inovatif sebagai langkah meningkatkan pelayanan wisata dan mengembangkan desa wisata.

2. Desa Wisata

a. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menyajikan keaslian kehidupan masyarakat dari segi adat istiadat, sosial dan budaya, tradisi, arsitektur, dan pekerjaan keseharian masyarakat di desa yang disajikan dalam suatu bentuk yang terintegrasi pada komponen pariwisata antara lain, seperti: atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung wisata.

Fandeli (2002: 73) menyatakan, desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang menyajikan keseluruhan situasi dan kondisi yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari segi adat istiadat, kehidupan sosial budaya, aktivitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, kuliner khas, cenderamata, *home stay*, dan kebutuhan wisata lainnya.

Temuan di Kampung Semadang Malaysia oleh Lo et al. (2017: 14) mengungkapkan bahwa wisatawan lebih peduli kualitas akomodasi, infrastruktur, berbagai kegiatan, dan acara khusus untuk pengembangan daya saing tujuan wisata di daerah tujuan wisata perdesaan. Selain itu, wisatawan juga percaya bahwa keberadaan dukungan masyarakat sangat penting dalam memodernisasi hubungan antara kualitas akomodasi dan daya saing tujuan wisata.

Desa Wisata Gamplong adalah desa wisata yang berbasis masyarakat yang memiliki ciri khasnya yaitu disebut juga desa cenderamata yang memproduksi tas, aksesoris, kotak pensil yang berbahan serat alam atau terkenal dengan desa kerajinan tenun yang menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang sudah sangat jarang ada di daerah lain.

Kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Biasanya hasil dari sebuah kerajinan dapat menghasilkan produk hiasan cantik, benda dengan sentuhan seni yang terampil, dan menghasilkan barang yang bermanfaat. Kerajinan yang terdapat di Desa Wisata Gamplong ini adalah kerajinan tenun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) dan kerajinan yang menghasilkan tas, kotak pencil, tikar, dan berbagai aksesoris yang berbahan dasar dari serat alam.

Wisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan jenis pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pembangunan pariwisata, pengelolaan pariwisata, dan masyarakat juga memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata. Sedangkan, desa wisata berbasis masyarakat merupakan keseluruhan aktivitas wisata pedesaan yang melibatkan masyarakat lokal dalam menjalankan proses kegiatan wisata. Kegiatan pariwisata yang menyajikan bentuk integrasi, atraksi, dan akomodasi, serta fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat di desa dan menyatu dengan adat istiadat serta tradisi yang berlaku di desa setempat.

Butler (1980: 7) menyatakan proses pengembangan wisata pedesaan yang berbasis masyarakat bisa melalui tiga fase, yaitu: fase eksplorasi, fase keterlibatan, dan fase pengembangan. Fase eksplorasi ialah masyarakat terlibat dalam mengeksplorasi kondisi sosio-budaya, ekonomi, dan lingkungan pedesaan tempat tinggal. Selanjutnya, fase keterlibatan dalam model Butler ditandai keterlibatan penduduk setempat dalam menerima pengunjung wisata dan bersama-sama mengembangkan serta menjaga kekayaan yang terdapat di desa tempat tinggalnya. Kemudian, fase pengembangan adalah awal transisi dari lokal untuk kontrol eksternal atas perusahaan pariwisata, upaya lebih besar untuk menarik pengunjung, kebutuhan yang lebih besar untuk dukungan regional dan/atau nasional dalam mengelola infrastruktur, dan menggeser tuntutan tenaga kerja (dipenuhi melalui mengimpor tenaga kerja atau transisi mata pencaharian). Penampilan fisik daerah mulai berubah, baik melalui sumber daya, atraksi, dan akomodasi dari pariwisata pedesaan.

Pengembangan *Community Based Tourism* terdapat dimensi-dimensi utama yang harus dapat dipenuhi supaya pengembangan program dapat terealisasi dan memberi manfaat kepada masyarakat. Suansri (2003: 21-22) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) dimensi utama pengembangan *Community Based Tourism* yaitu:

1. Dimensi ekonomi, yakni adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

2. Dimensi sosial, yakni meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, dan membangun penguatan organisasi komunitas.
3. Dimensi budaya, yakni mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, dan budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.
4. Dimensi lingkungan, yakni mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah dan meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.
5. Dimensi politik, yakni meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, dan menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA.

Pemerataan pembangunan dan upaya percepatan di sekitar desa, telah dilakukan beberapa program atau kegiatan di tingkat desa berbasis pemberdayaan masyarakat serta mengoptimalkan potensi lokal di desa seperti desa wisata. Dengan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengembangan desa wisata, maka dari itu juga dapat digunakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat setempat. Hasil penelitian yang dilakukan di Kendal oleh Widodo et al. (2017: 185) menunjukkan bahwa Desa Tanjungsari berkembang menjadi pendidikan yang layak tentang cara membudidayakan ikan dan membuat kerajinan kaligrafi yang memiliki potensi wisata antara sentral industri pengolahan rumah tangga lainnya dan pemasaran ikan rebus

dan asap, serta kerajinan kaligrafi. Model pembangunan Kampung Tanjungsari di arahkan untuk memberdayakan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan desa wisata mulai dari sosialisasi dan pengambilan keputusan untuk mempersiapkan komponen pariwisata dan pembentukan Pokdarwis.

Hasil penelitian di atas memberikan pandangan bahwa Periwisata melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat setempat dalam sektor wisata terdiri dari dua perspektif yaitu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pariwisata yang berkaitan dengan keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari sektor wisata.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip pokok strategi perencanaan pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat (*community based tourism*). Sunaryo (2013: 140) menyatakan 3 prinsip, yaitu:

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Adanya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Hasil penelitian yang dilakukan di Malawi oleh Bello et al. (2016: 9) menyebutkan 6 (enam) strategi muncul sebagai prasyarat utama untuk mencapai penuh dan partisipasi masyarakat yang aktif yakni: 1) kesadaran masyarakat dan pendidikan, 2) pembangunan kapasitas, 3) penciptaan keterkaitan, 4) menggunakan metode partisipasi yang tepat, 5) keterlibatan

organisasi masyarakat lokal yang tepat, dan 6) desentralisasi dan koordinasi organisasi manajemen yang relevan.

Berdasarkan pendapat di atas terlihat bahwa *Community Based Tourism* (CBT) sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya (*mass tourism*). Pada *Community Based Tourism* (CBT) komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat. Wisata berbasis masyarakat yang diterapkan oleh Paguyuban TEGAR di Desa Wisata Gamplong tujuannya adalah membuat masyarakat desa untuk berpartisipasi terhadap aktivitas wisata yang ada di Desa Wisata Gamplong serta memberikan peluang untuk menambah penghasilan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Kegiatan program yang dilaksanakan di Desa Wisata Gamplong yaitu kegiatan pelatihan (*training*), kegiatan wisata edukasi, dan kegiatan produksi serta pemasaran produk kerajinan tenun. Ketiga jenis kegiatan ini dikolaborasikan menjadi program kerajinan tenun yang dikelola oleh Paguyuban TEGAR Desa Wisata Gamplong. Hasil penelitian Sujarwo et.al (2018: 119) menunjukkan bahwa model wisata belajar (wisata edukasi) dilakukan melalui pembelajaran luar sekolah dengan tahapan sosialisasi program wisata belajar yaitu kegiatan inti, penyambutan, bina suasana, pojok kreatif, reflektif, dan penutup. Tujuan wisata edukasi untuk menanamkan perilaku peduli lingkungan menghargai sesama, menumbuhkan kreativitas,

sadar bersih lingkungan, menyayangi tumbuhan, bersikap santun, dan memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik.

Kemudian, kegiatan wisata kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong tersebut menjadi destinasi tersendiri yang unik dan sangat jarang ditemui di tempat-tempat wisata lainnya, yaitu melihat proses produksi kerajinan tenun menggunakan alat tenun tradisional atau Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dengan bahan tenun terbuat dari serat alam yang dikerjakan menggunakan tangan-tangan kreatif sehingga menghasilkan produk kerajinan tenun yang bernilai tinggi.

b. Tujuan Desa Wisata

Tujuan desa wisata ialah untuk meningkatkan keuntungan masyarakat pedesaan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan produk pariwisata (Okech, 2014: 94). Selain itu, tujuan dari desa wisata ini adalah:

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin potensi pedesaan secara komprehensif sebagai langkah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mendirikan desa wisata sebagai salah satu bentuk pengembangan pariwisata alternatif.
2. Menambah variasi produk wisata dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang keparawisataan untuk dapat memberi manfaat dan keterlibatan dari masyarakat lokal melalui pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism sevelopment*) dan pariwisata berbasis masyarakat lokal (*community based tourism*).

3. Mendorong terciptanya pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang lebih terencana, terarah, dan terlaksana secara berkelanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chio (2017: 2) di Desa Wisata Etnis yang ada di China menunjukkan bahwa tontonan pedesaan dan etnis di bidang pariwisata menyajikan ciri khas pedesaan, yakni busana pakaian masyarakat dengan berpakaian yang halus dan berciri khas. Selain itu, arsitektur desa yang telah direnovasi biasanya dianggap sebagai sarana yang diperlukan. Tujuan yang diinginkan dari Desa Wisata Etnis ini ialah untuk meningkatkan ekonomi lokal.

Penelitian Dorobantu (2012: 60) menyatakan pentingnya bagi masyarakat lokal dan komunitas untuk mempromosikan wisata pedesaan dan potensi wisata yang ada di Rumania baik dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya kontribusi dari masyarakat lokal dengan komunitas memberikan perubahan signifikan terhadap perkembangan wisata pedesaan di Rumania.

Begitu juga dengan Desa Wisata Gamplong, tujuan utama dari Desa Wisata Gamplong ialah memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk mampu mengembangkan desa menjadi desa yang mandiri dan dikenal khalayak. Selain itu, menjadi destinasi tujuan wisatawan dengan ciri khas wisatanya, yaitu desa dengan produksi kerajinan tenun menggunakan alat tradisional serta menjaga keeksistensiannya desa wisata. Sehingga akan memperoleh *feedback* dari Desa Wisata Gamplong ini karena

adanya peningkatan pendapatan masyarakat lokal sehingga perekonomian masyarakat lokal dapat sejahtera.

c. Karakteristik Desa Wisata

Desa wisata adalah di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, biasanya di desa-desa yang terpencil, dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Artinya, desa wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik utama dari sebuah desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan.

Ketika suatu desa telah disepakati dan dicanangkan sebagai desa wisata mestinya di desa itu memiliki potensi daya tarik dengan karakteristik pedesaan yang non urban. Karakteristik itu akan terwakili oleh kehidupan tradisional dan keunikan-keunikan yang melingkupinya. Penilaian mendasar untuk pengembangan suatu desa atau kawasan menjadi desa wisata hendaknya memperhatikan beberapa hal antara lain, yaitu:

- a. Melestarikan warisan budaya masyarakat lokal.
- b. Pengembangan wisata harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
- c. Memberi pengalaman dan kenangan yang menyenangkan, mengesankan kepada wisatawan.
- d. Pengemasan potensi desa sebagai produk wisata yang dapat laku dijual.

Pendekatan karakteristik mensyaratkan adanya tindakan identifikasi dan pengkajian berbagai hal yang melekat pada desa itu yang memiliki kekhasan yang dapat dikemukakan, seperti:

- a. Karakteristik budaya berbagai hal yang terkait dengan kehidupan budaya, tradisi, adat, kesenian, dan tata cara kehidupan yang diwarisi secara turun-temurun.
- b. Karakteristik yang ada hubungannya dengan mata pencaharian masyarakat di kawasan atau desa itu, yakni kehidupan sehari-hari masyarakat setempat atas pola mata pencaharian yang dilakukannya, misal: sebagai petani, pengrajin, dan bekerja di kebun.
- c. Karakteristik alam, ciri khasnya berkenaan dengan lingkungan alam, apakah sungai, gunung, lembah, danau yang memiliki karakteristik yang dapat disampaikan.
- d. Karakteristik bangunan fisik daya tariknya dapat diwakili oleh kondisi fisik bangunan tradisional, seperti: tempat tinggal, fasilitas umum, tempat ibadah, atau bangunan-bangunan fisik lainnya yang berbeda dengan daerah lain sehingga memiliki keunikan tersendiri.

Mengembangkan daya tarik suatu desa tidak diikuti dengan mempertimbangkan karakteristik di atas akan sama dengan memaksakan kehendak sebuah desa menjadi desa wisata, di samping akses dan amenities serta peran dari masyarakatnya lokal. Desa Wisata Gampong memiliki karakteristik desa wisata kerajinan yang menyajikan kerajinan sebagai ciri khas desa wisata ini. Kerajinan tenun merupakan *icon* dari Desa Wisata

Gamplong maka dalam penelitian ini akan melakukan kajian evaluasi program kerajinan tenun yang ada di Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konteks, masukan, proses, dan produk program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong.

d. Program-Program Desa Wisata

Eksistensi desa wisata yang ada sekarang ini muncul dan berkembang berdasarkan kegiatan turun temurun yang menjadi unggulan di desa tersebut. Beberapa program kegiatan yang menjadikan desa tersebut sebagai desa wisata antara lain, yaitu:

1. Kerajinan menjadi Desa Wisata Berbasis Kerajinan.
2. Tradisi dan Seni budaya menjadi Desa Wisata Berbasis Seni Budaya.
3. Pertanian menjadi desa Wisata Berbasis Pertanian.
4. Keindahan alam lingkungan menjadi Desa Wisata Berbasis Nuansa Alam.
5. Sejarah peninggalan menjadi Desa Wisata Sejarah.

Selain basis-basis desa wisata tersebut, desa-desa di Indonesia memiliki keanekaragaman dan keunikan yang luar biasa. Maka diperlukan kemampuan dan pengetahuan serta kreativitas dalam menggali potensi desa.

Berdasarkan jenis kegiatan program yang ada di desa wisata di atas, penelitian ini berfokus di Desa Wisata Gamplong yang memiliki program di bidang wisata berbasis kerajinan. Kerajinan industri rumahan yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Desa Wisata Gamplong. Industri rumahan ini membentuk sebuah kelompok paguyuban yang diberi nama Paguyuban

Tegar. Salah satu program yang diunggulkan di Desa Wisata Gamplong ini yaitu program kerajinan tenun. Penelitian ini melakukan kajian analisis mengenai evaluasi program kerajinan tenun yang ada di Desa Wisata Gamplong.

3. Program Kerajinan Tenun

a. Pengertian Kerajinan Tenun

Kadjim (2011: 10) menyatakan, kerajinan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh semangat ketekunan kecekatan, kegigihan, berdedikasi tinggi, dan berdaya maju yang luas dalam melakukan suatu karya. Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (kerajinan tangan).

Sejalan dengan pendapat di atas, Suharso (2011:403) menyatakan bahwa kerajinan berasal dari kata rajin yang artinya suka bekerja, sungguh-sungguh bekerja, selalu berusaha giat, dan kerajinan adalah perihal rajin, kegiatan atau pekerjaan yang kerap kali dilakukan, sehingga menghasilkan suatu barang melalui keterampilan tangan. Kerajinan juga merupakan aset budaya sekaligus juga aset pariwisata produk kerajinan mempunyai peran yang tidak sedikit dalam upaya mendongkrak perekonomian rakyat dan kunjungan wisatawan. Produk-produk kerajinan khas daerah daerah di Indonesia sudah mendapat tempat di hati para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Kerajinan yang terdapat di Desa Wisata Gamplong ini ada 3 (tiga) jenis yakni, kerajinan anyaman, kerajinan ukir, dan kerajinan tenun. Berdasarkan ketiga jenis kerajinan yang terdapat di Desa Wisata Gamplong ini jenis kerajinan tenunlah yang paling diunggulkan. Program kerajinan tenun menjadi unggulan karena merupakan *icon* dari desa wisata sekaligus merupakan warisan yang paling tertua di Gamplong.

Tenun merupakan salah satu seni budaya kain tradisional Indonesia yang diproduksi di berbagai wilayah Nusantara berupa hasil keterampilan tangan manusia dengan menggunakan alat tenun yang sangat sederhana atau tradisional. Tenun memiliki makna, nilai sejarah, dan teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan serta benang yang digunakan serta tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Tenun juga merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Kerajinan tenun yang ada di Desa Wisata Gamplong ini merupakan warisan tradisi sejak dahulu dan masih bertahan sampai sekarang ini. Tradisi kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong ini menjadi warisan tersendiri bagi masyarakat setempat, sehingga banyak dari mancanegara mengenal bahwa Gamplong ini merupakan desa kerajina tenun. Saat ini Desa Gamplong telah menjadi desa wisata yang dikenal dengan Desa Wisata Gamplong yang menonjolkan kekhasan desa wisata yaitu kerajinan tenun.

b. Model-Model Kerajinan Tenun

Djoemena (2000: 11) mengatakan alat tenun adalah alat untuk menganyam benang-benang yang letaknya membujur (benang lungsi) dan benang yang pada alat ini letaknya melintang (benang pakan). Hasil dari alat ini adalah anyaman yang disebut kain. Istilah yang dipergunakan untuk alat ini dapat berbeda dari daerah ke daerah. Di museum Mojokerto, Jawa Timur, terdapat umpak batu dari abad ke-14 Masehi, dengan relief seorang wanita sedang menenun dengan menggunakan alat tenun gendong, yang bentuknya hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Pada zaman itu pekerjaan di luar lingkungan rumah, seperti berburu, mencari bahan makanan di hutan dikerjakan oleh kaum pria, dan pekerjaan di lingkungan rumah oleh kaum wanita, seperti memasak, menenun, dan berternak.

Berdasarkan model-model peralatannya jenis-jenis alat tenun menurut Djoemena (2000: 12), antara lain sebagai berikut:

1) Alat Tenun Gendong

Di pulau Jawa dinamakan demikian, karena ada bagian alat tenun tersebut, yaitu *epor* yang diletakkan di belakang pinggang, seolah-olah digendong sewaktu menenun. Disebut pula dengan istilah tenun *gedog*, dikarenakan bunyinya terdengar *dog dog dog* sewaktu menekan benang pakan dengan alat bernama liro, di samping itu *gedog* (bahasa jawa) berarti pula ketuk. Alat tenun ini sangat sederhana dan digerakkan dengan tangan.

Ciri yang menonjol dari alat tenun gendong adalah bahwa tegangan dari benang lungsi diperoleh dengan menyambung ke dua ujung apit

dengan tali *epor* pada *epor* yang disandari oleh penenun. Alat *epor* ini dibuat dari kayu, bahkan ada yang diukir, tetapi ada pula yang dibuat dari kulit hewan atau anyaman dari tali serta kulit hewan. Hingga kini alat tenun gendong ini dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang berarti, dan perbedaannya dari daerah yang satu ke daerah yang lain di seantero kepulauan Indonesia, hampir tidak ada. Hal ini merupakan pertanda bahwa jenis kebudayaan daerah Indonesia mengandung banyak persamaan.

Ada dua teknik menenun pada alat tenun gendong dengan hasil tenunan yang berbeda. Pada teknik pertama ujung benang lungsi diikatkan dan kemudian digulungkan pada patek. Ujung benang yang satunya lagi diikatkan pada apit yang juga berfungsi sebagai penggulung kain hasil menenun, cara ini disebut *discontinuous warp*. Hasil kain tenun jenis ini berupa lembaran. Pada teknik kedua (*continuous warp*), kedua ujung benang lungsi disambung (*dibuhul*) menjadi satu, sehingga kain hasil tenunnya berupa tabung, yang kemudian digunting untuk mendapatkan selebaran kain tenun.

Di Jawa pada umumnya menggunakan jenis alat tenun gendong yang pertama (*discontinuous warp*). Di beberapa daerah, antara lain di daerah suku Dayak, Kalimantan dan di daerah Nusantara bagian Timur menggunakan jenis yang kedua (*continuous warp*). Sebagai catatan, alat tenun gendong yang kita kenal di Indonesia, benang-benang lungsinya diletakkan dalam posisi miring dengan sudut kemiringan yang berbeda-

beda dari daerah ke daerah, tidak seperti antara lain pada suku Indian dan Afrika pada umumnya, dimana posisi benang lungsinya nyaris tegak lurus.

2) Alat Tenun Bendho

Alat tenun *bendho* atau *bodhing* adalah alat tenun yang digunakan untuk membuat stagen (ikat pinggang). Alat tenun ini terdapat di daerah Solo dan Yogyakarta yang berukuran lebar ± 15 cm dan panjang ± 3 m. Dinamakan alat tenun *bendho*, karena alat untuk merapatkan benang pakan berbentuk *bendho*, bahasa Jawa, yaitu golok. Adapula yang menyebut alat ini dengan istilah alat tenun *bodhing*, karena dilihatnya alat yang merapatkan benang pakan menyerupai *bodhing*, bahasa Jawa untuk sabit atau arit. Alat tenun ini dinamakan juga alat tenun stagen, karena alat ini dipergunakan untuk membuat stagen. Pada umumnya, kain yang dibuat dengan alat ini bercorak jaluran atau garis-garis dan polos. Si penenun bekerja sambil berdiri, karena alat tenun *bodhing* mempunyai kaki tinggi.

3) Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dan Alat Tenun Mesin (ATM)

Sejarah Alat tenun gendong berkembang menjadi alat tenun tijak, yang pada tahun 1927 oleh Tekstiel Institut Bandung (TIB, sekarang Balai Besar Tekstil Bandung), dikembangkan lagi menjadi alat tenun tijak dengan teropong layang. Dikenal sebagai alat tenun TIB, yang selanjutnya dikenal orang sebagai ATBM, perkembangan ini berlanjut dengan teknik yang lebih canggih dengan diperkenalkannya ATM yang serba mekanis.

Hasil tenun ATBM dan ATM yang lebih halus, lebar dan murah, karena lebih efisien mendesak kerajinan tenun gendong. Kain tenun gendong masih dicari oleh sementara orang, karena nilai-nilai emosionalnya yang erat hubungannya dengan upacara dalam daur kehidupan serta falsafah dan pandangan hidup mereka.

Program kerajinan tenun yang ada di Desa Wisata Gamplong menggunakan model kerajinan tenun menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) untuk menghasilkan beberapa jenis produk tenun seperti kain lurik, tenun ikat, dan tenun songket, tas, dompet, dan lain-lain.

c. Program Kerajinan Tenun dalam Paradigma yang Ideal

Kemajuan desa wisata dan program-program yang ada hendaknya diimbangi dengan kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu program di masyarakat. Program kerajinan tenun dapat dilihat dalam konteks program yang ideal. Stufflebeam & Shinkfield (1985: 169-172) mengemukakan bahwa evaluasi dapat dirincikan dari 4 (empat) komponen CIPP (*context, input, process*, dan *product*) program kerajinan tenun, sebagai berikut:

1) Komponen Konteks Program Kerajinan Tenun

Stufflebeam & Shinkfield (1985: 169) mengemukakan bahwa orientasi utama dari komponen evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latar belakang perlunya mengadakan perubahan dengan membuat program, melihat kondisi lingkungan dan penyelenggara program serta

mengidentifikasi tujuan program. Berdasarkan pernyataan di atas akan dijelaskan orientasi komponen konteks sebagai berikut:

a) Faktor Kebutuhan Masyarakat

Program diselenggarakan dapat mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat. Program dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Program dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan kebutuhan keluarga. Masyarakat lokal dengan kemauan sendiri dan inisiatif masyarakat sendiri untuk mengikuti program. Adanya musyawarah antara pengelola program dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

b) Kondisi Lingkungan dan Penyelenggara Program

Ketersediaan sumber daya alam mendukung penyelenggaraan program. Kondisi lingkungan dapat menunjang penyelenggaraan program. Latar belakang penyelenggara program sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki untuk menyelenggarakan program. Kualifikasi penyelenggara program sesuai dengan bidangnya. Masyarakat lokal dilibatkan dalam proses penyelenggaraan program.

c) Tujuan Program

Tujuan program memberikan peluang bagi masyarakat untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan meningkatkan kualitas hidup. Adanya motif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

2) Komponen Input Program Kerajinan Tenun

Stufflebeam & Shinkfield (1985: 170) mengemukakan bahwa orientasi utama dari komponen evaluasi input meliputi ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana, prosedur pelaksanaan, relasi, dan anggaran dana. Berdasarkan pernyataan di atas berikut akan dijelaskan orientasi komponen input meliputi:

a) Pengelola Program

Pengelola program memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola program. Pengelola program menetapkan tugas dan jabatan kepada anggota berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati dari hasil musyawarah. Kriteria pemilihan memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki, serta memperhatikan pengalaman yang telah dimiliki oleh pengelola program.

b) Pemandu Wisata

Pemandu wisata memiliki pengalaman dan berkompetensi dibidangnya. Pemandu wisata adalah masyarakat lokal dan mempunyai kemauan untuk mengikuti kegiatan pelatihan pemandu wisata yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan meningkatkan keterampilan.

c) Pemilik UKM

Pemilik UKM memiliki kompetensi dibidangnya serta mampu mengelola usaha. Pemilik UKM kerajinan tenun adalah masyarakat lokal yang memiliki industri rumahan kerajinan tenun dan memiliki sarana dan

prasarana untuk memproduksi kerajinan tenun, serta memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan usaha.

d) Pengerajin Tenun

Pengerajin tenun memiliki kompetensi dibidang produksi kerajinan tenun di UKM kerajinan tenun. Pengerajin tenun bersedia mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menenun serta keterampilan memproduksi variasi dan inovasi produk kerajinan tenun.

e) Sarana dan Prasarana Program

Sarana dan prasarana program tersedia seperti sekretariat, lahan parkir, fasilitas produksi kerajinan tenun, fasilitas kegiatan wisata edukasi, dan fasilitas pemandu wisata. Sarana dan prasarana memberikan kemudahan dan kebermanfaatan. Adanya perawatan dan pengontrolan secara langsung terhadap sarana dan prasarana yang disediakan.

f) Prosedur atau Langkah-Langkah Program

Langkah-langkah program dilakukan melalui kesepakatan bersama oleh pengelola dan pelaksana program. Musyawarah dilakukan bertujuan mengambil keputusan secara bersama-sama. Prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan program dapat dipahami oleh seluruh pengelola dan pelaksana program.

g) Relasi

Adanya hubungan kerjasama dengan pihak eksternal dan memberi dukungan, kepercayaan, bantuan dari segi dana dan fasilitas. Adanya relasi

dengan kalangan pemerintah dalam memberi bantuan dan memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan program.

h) Anggaran Dana Program

Anggaran dana tersedia dan dianggarkan atas dasar kesepakatan bersama dalam musyawarah. Anggaran dikelola melalui mekanisme musyawarah dengan seluruh pengelola dan pelaksana program untuk menentukan penyaluran anggaran dana program.

3) Komponen Proses Program Kerajinan Tenun

Stufflebeam & Shinkfield (1985: 171) mengemukakan bahwa orientasi utama dari komponen evaluasi proses meliputi implementasi program, kemampuan pengelola dan pelaksana program, hambatan program, pemanfaatan sarana dan prasarana program, kemampuan pemandu wisata, dan kesesuaian anggaran dana program. Berikut akan dijelaskan secara rinci.

a) Implementasi Program

Implementasi program terlaksana sesuai rencana dan tepat waktu. Implementasi program sesuai dengan harapan/permintaan dari konsumen atau pengunjung wisata, serta dapat terlaksana sesuai anggaran yang telah disediakan. Adanya pelibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam implementasi program.

b) Kemampuan Pengelola dan Pelaksana Program

Kemampuan pengelola dan pelaksana program sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta sesuai dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh pengelola program. Pengelola dan pelaksana program dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan. Mampu bekerjasama dalam sebuah tim/organisasi.

c) Anggaran dana sesuai kebutuhan program

Anggaran dana mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program. Anggaran dikelola melalui mekanisme musyawarah untuk menentukan penyaluran anggaran dana program serta anggaran transparan dengan seluruh anggota/pengelola program.

d) Kemampuan pemandu wisata

Pemandu wisata sesuai dengan kompetensi dan memiliki pengalaman serta kemampuan berkomunikasi dengan ramah dan sopan. Pemandu wisata memiliki kemampuan bersosialisai, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang wisata. Pemandu wisata terdiri dari masyarakat lokal yang telah mengikuti kegiatan pelatihan pemandu wisata, sehingga masyarakat memperoleh peluang kerja.

e) Hambatan program

Pengelola dan pelaksana program memiliki kemampuan dalam mengatasi hambatan yang dialami, memiliki alternatif untuk menangani hambatan yang dihadapi pada saat penyelenggaraan program, dan penyelenggaraan program dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan harapan.

f) Pemanfaatan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana program pada saat proses pelaksanaan program dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program, dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya, serta dapat memberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan program.

4) Komponen Produk Program Kerajinan Tenun

Stufflebeam & Shinkfield (1985: 171) mengemukakan bahwa orientasi utama dari komponen evaluasi produk meliputi ketercapaian tujuan program, dan dampak yang dialami dari penyelenggaraan program. Berdasarkan pernyataan di atas berikut akan dijelaskan orientasi komponen produk yaitu:

a) Ketercapaian tujuan

Terjadi perubahan pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, pencapaian hasil pelatihan (*training*) dapat diterapkan oleh pengelola dan pelaksana program, terciptanya perbaikan kehidupan masyarakat, peningkatan jumlah pengunjung wisata, dan mengurangi pengangguran, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

b) Dampak program

Masyarakat mendapatkan penghasilan yang mencukupi kebutuhan, masyarakat memiliki kemandirian, menunjang eksistensi program, dan terciptanya perbaikan bidang usaha yang dimiliki oleh masyarakat.

4. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam & Skinkfield (1985: 45) menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses untuk mengetahui kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dimana hasil evaluasi nantinya akan menentukan kebijakan atau keputusan berikutnya.

Berdasarkan konsep tersebut dapat dipahami bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan rancangan yang disusun sejak awal. Pertimbangan apakah suatu program sudah berjalan sesuai tujuan atau tidak, dan dilakukan berbasis kriteria-kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan program.

Worthen & Sanders (1987: 129) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu bentuk proses yang menggambarkan, menyajikan, dan menghasilkan informasi yang dapat berguna dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan suatu program yang dievaluasi.

Mahrens & Lehmann (1973: 6) menyatakan bahwasanya evaluasi merupakan suatu proses membuat suatu keputusan yang berdasarkan ukuran atau nilai yang telah ditetapkan. Sedangkan Arikunto (2004: 272)

mengemukakan bahwa evaluasi ialah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang segala bentuk proses kegiatan, yang kemudian informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan sebuah alternatif yang tepat dalam pengambilan sebuah keputusan.

Komitmen pemerintah nasional yang semakin meningkat terhadap pendanaan kegiatan pemasaran administrasi kepariwisataan mereka di luar negeri telah dibarengi dengan tuntutan untuk evaluasi yang lebih ketat terhadap keefektifan kegiatan-kegiatan ini. Pendekatan yang lebih ketat dan komprehensif untuk evaluasi juga diperlukan untuk memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan strategis (Faulkner, 1997: 23).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa evaluasi adalah bentuk upaya mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi yang dapat menjadi masukan dalam mengambil keputusan atau kebijakan dimasa yang akan datang, serta apakah suatu program dapat dilanjutkan, diperbaiki/modifikasi atau diganti dengan yang lebih efektif. Evaluasi pada penelitian ini yaitu evaluasi program kerajinan tenun berbasis masyarakat di Desa Wisata Gamplong. Kemudian hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menentukan atau melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan program, kualitas kinerja pelaksana program, keefektifan dan keefisienan program, serta apakah suatu program dapat dilanjutkan, diperbaiki/modifikasi atau diganti dengan yang lebih efektif.

b. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi menurut Sudjana (2006: 37) menyatakan bahwa evaluasi bertujuan sebagai pengarah kegiatan evaluasi program dan sebagai landasan atau acuan dalam mengetahui keefektifan dan keefesienan dari program yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan: (1) memberikan masukan terkait untuk perencanaan program, (2) memberikan masukan terkait untuk kelanjutan dan pengembangan program, (3) memberikan masukan terkait untuk memodifikasi program, (4) untuk memperoleh informasi terkait faktor pendukung dan penghambat program, (5) memberikan masukan terkait untuk pembinaan dan motivasi kepada pengelola program, dan (6) memberikan masukan terkait untuk pemahaman landasan dan keilmuan dalam mengevaluasi program.

Sukardi (2014: 41) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian program yang dievaluasi terhadap tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program ialah untuk menentukan relevansi, efektivitas, efesiensi, ketercapaian tujuan, dan keberlanjutan program, di mana sebuah evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya serta bermanfaat bagi pengelola program untuk mengambil pelajaran dalam menentukan sebuah keputusan.

Dalam penelitian ini evaluasi program digunakan untuk melihat seberapa besar keberhasilan dan kegagalan program serta menemukan solusi dan alternatif strategi untuk meningkatkan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan, serta menentukan apakah program dapat dilanjutkan,

dimodifikasi, atau diberhentikan. Evaluasi program dilakukan untuk mengembangkan Desa Wisata Gamplong supaya tetap menjaga keeksistensiannya dan terus berkembang.

c. Fungsi Evaluasi

Jahanian (2012: 253) menyatakan bahwa fungsi evaluasi adalah untuk mengukur ketercapaian dari program terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengambilan sebuah keputusan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Selanjutnya, Fakhruddin (2011: 22) menyatakan bahwa evaluasi berfungsi sebagai: (1) mengukur pelaksanaan program berjalan sesuai standar, (2) mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, (3) menilai implementasi program sesuai dengan perencanaan, (4) mengidentifikasi dan menemukan mana program yang berjalan dan mana program yang tidak berjalan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi adalah untuk mengukur sejauh mana ketercapaian sebuah program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman program, sebagai pertimbangan dalam menentukan keputusan dan tindak lanjut dari sebuah program.

Hasil penelitian Dahiya & Jha (2011: 11) menyebutkan bahwa fungsi evaluasi pada pelatihan dan kursus cenderung menjadi tuntutan sosial pada lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus, program pelatihan tidak lengkap apabila program tersebut belum dilakukan evaluasi, fungsi dari evaluasi supaya penyelenggara program dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan program yang telah dilaksanakan.

Pada penelitian ini evaluasi program berfungsi untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dan kegagalan program kerajinan tenun serta melihat keefektifan dan keefesienan dari program kerajinan tenun yang sudah dilaksanakan. Evaluasi program kerajinan tenun fungsinya untuk menilai dan memberikan masukan dalam pengembangan program supaya tetap bisa menjaga keeksistensiannya dan terus berkembang

5. Evaluasi Program Model CIPP

a. Model

Secara umum model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Salah satunya ialah kegiatan dalam melakukan evaluasi program. Model yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi program ada banyak model. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam cara menganalisis namun memiliki persamaan yaitu dalam mengumpulkan data dan informasi objek yang dievaluasi. Model-model digunakan sesuai dengan kajian evaluasi yang hendak dicapai. Sehingga, peneliti menentukan model evaluasi apa yang relevan dengan masalah yang hendak diteliti dan tujuan yang hendak dicapai serta dengan metode yang cocok terutama dalam melakukan kajian evaluasi program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong.

b. Evaluasi Program

Sebuah program idealnya selalu dilakukan evaluasi. Tujuannya ialah untuk melihat apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya, dengan

kata lain untuk melihat ketercapaian perencanaan dengan hasil dicapai. Isaac & Michael (1982: 6) menyatakan tiga rangkaian dalam evaluasi program yaitu: (1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan penelitian, dan (3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki, dan menghentikan program tersebut.

Tiga rangkai tahapan di atas merupakan kesatuan yang utuh untuk menetapkan informasi yang valid dan menjadi dasar dalam proses evaluasi. Artinya, dalam hal ini data dan informasi yang relevan dapat menjadi landasan dalam menentukan keputusan dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diperoleh.

Nugroho (2003: 183) menyatakan, evaluasi program sebagai kegiatan untuk menilai keefektifan program. Evaluasi program dapat digunakan untuk melihat ketercapaian dan mengetahui kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Selanjutnya, Rossi & Freeman (1985: 45) menyatakan bahwa evaluasi program merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kebutuhan implementasi serta dampak dari suatu program. Pada intinya evaluasi program dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu program.

Evaluasi program dalam penelitian ini adalah evaluasi program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong. Tujuannya evaluasi program ini adalah untuk melihat atau menemukan *context*, *input*, *process*, dan *product* kerajinan

tenun di Desa Wisata Gamplong. Model evaluasi yang dipilih yaitu evaluasi model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

c. Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Model evaluasi CIPP ini dikembangkan oleh (Stufflebeam & Shrinkfield, 1985). Nama model CIPP berasal dari konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*product*). Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program, maupun institusi.

Pada bidang pendidikan digolongkan atas empat dimensi, yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*, sehingga disebut evaluasi CIPP. Evaluasi *context* menilai berbagai kebutuhan, masalah-masalah, kesempatan sebagai dasar untuk mendefinisikan tujuan dan prioritas dan menentukan hasil. Evaluasi *input* menilai pendekatan alternatif untuk menentukan alat yang diperlukan dalam perancangan program dan sumber daya yang dibutuhkan. Evaluasi *process* menilai implementasi dari program yang merupakan kerangka kerja dan kemudian membantu menjelaskan dampak dari program. Evaluasi *product* bermaksud mengetahui tingkat keberhasilan dan dampak dirasakan dari hasil program.

Berikut komponen evaluasi model CIPP (Stufflebeam & Shrinkfield, 1985: 128) yaitu:

a) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Stufflebeam (1983: 128) menyatakan bahwa evaluasi konteks ini tujuannya untuk memberikan gambaran situasi dan spesifikasi tentang lingkungan program yang dapat membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Konteks juga memberikan informasi tentang rasionalnya suatu program. Sax dalam Eko et.al (2017:177) menerangkan bahwa evaluasi kontek (*context evaluation*) dapat dikatakan sebagai penggambaran dan merinci lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat point penting yang terdapat dalam evaluasi konteks (*context*) yaitu tentang kebutuhan dan tujuan yang mendasari mengapa evaluasi harus dilakukan. Evaluasi konteks ini membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi terhadap konteks (*context*) ini dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan program.

Evaluasi terhadap konteks (*context*) yang dilakukan dalam pada penelitian ini meliputi: deskripsi kebutuhan masyarakat, menggambarkan dan merinci kondisi lingkungan dan penyelenggara yang sesuai dengan program, dan merumuskan tujuan yang sesuai dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Desa Wisata Gamplong.

b) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Stufflebeam et.al (2002: 292) menyebutkan bahwa orientasi utama dari evaluasi input yaitu untuk membantu mereseapkan suatu program yang dapat digunakan untuk membawa perubahan yang diperlukan. Evaluasi input harus mencari lingkungan klien tentang sumber daya, hambatan, kendala, biaya yang berpotensi tersedia yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengaktifan program. Penjelasan Stufflebaem ini mengarahkan pada pentingnya perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang tersedia pada program. Endang (2011: 129) menyatakan bahwa evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapasitas sumber daya manusia, alat, bahan, dan biaya untuk melaksanakan program yang dipilih.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka point penting evaluasi masukan (*input*) adalah pentingnya perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang tersedia pada program. Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapasitas sumber daya yang ada, sarana dan prasarana, anggaran biaya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Evaluasi terhadap masukan (*input*) ini dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan program kerajinan tenun.

Evaluasi masukan (*input*) pada penelitian ini mengarah kepada perencanaan dengan melihat sumber daya pendukung program meliputi: sumber daya manusia, sarana dan prasarana, perencanaan langkah-langkah

strategi mencapai tujuan program, relasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan program, serta rencana pengelolaan anggaran dana program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong. Sumber daya pendukung kemudian akan dinilai apakah dapat memberikan dan mencapai hasil program yang diinginkan.

c) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses (*process evaluation*) diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terimplementasi sesuai dengan rencana. Selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

Worthen & Sanders (1987: 137) menyatakan, evaluasi proses digunakan untuk mengetahui sejauh mana rancangan prosedur atau rancangan implementasi yang sudah dilaksanakan. Selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki.

Stufflebeam et.al (2002: 295) menyatakan *process evaluation* ini ialah merupakan model CIPP yang diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana secara efektif dan efisien, hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi program, dan apakah sarana dan prasarana yang disediakan sudah dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, evaluasi proses juga digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi program.

Evaluasi terhadap proses (*process*) ini dilakukan pada saat pelaksanaan program atau bersamaan dengan pelaksanaan program kerajinan tenun. Evaluasi proses untuk *memonitoring* interaksi antar input sehingga membentuk proses, melihat kesesuaian apakah input diikuti dalam proses dan dioptimalkan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Evaluasi proses (*process*) dalam hal ini terkait apakah program terlaksana sesuai rencana atau tidak, apakah pengelola dan pelaksana program mampu melaksanakan program sesuai dengan rencana, apakah anggaran dana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan program, kemampuan pemandu wisata dalam melaksanakan tugasnya, dan apakah sarana dan prasarana yang disediakan sudah dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan program program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong.

d) Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk (*product evaluation*) diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau guru untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Sax (1980: 598) menyatakan, dari evaluasi proses diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau guru untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan.

Stufflebeam et.al (2002: 299) menyebutkan bahwa evaluasi produk ialah untuk melayani daur ulang suatu keputusan dalam program. Berdasarkan evaluasi produk diharapkan dapat membantu pimpinan mengetahui tujuan-tujuan program yang ditetapkan sudah tercapai, proyek dalam mengambil suatu keputusan terkait program yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dapat dilanjutkan, berakhir, atau digantikan dengan yang lebih efektif. Kemudian untuk melihat dampak dari hasil program yang telah dilaksanakan. Evaluasi terhadap hasil (*product*) ini dilakukan pada saat program telah selesai dijalankan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan diawal program.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada pihak yang dievaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan atau modifikasi, atau bahkan dihentikan.

Berdasarkan hasil penelitian Zhang et al. (2011: 57) menyebutkan bahwa model evaluasi Stufflebeam, *Context, Input, Process*, dan *Product* (CIPP) memberikan gambaran bahwa model ini direkomendasikan sebagai kerangka kerja secara sistematis membimbing konsepsi, desain, implementasi, penilaian proyek layanan pembelajaran dan memberikan umpan balik serta penilaian efektivitas proyek untuk peningkatan berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya serta dampak yang dirasakan masyarakat dari program yang telah dilaksanakan. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.

6. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari pihak luar atau tanpa dukungan dari pihak luar untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri dengan daya mereka sendiri (Totok & Poerwoko, 2017: 100). Pemberdayaan menghadirkan suatu usaha untuk menghindari ketergantungan, dengan kata lain kemampuan diri sendiri merupakan suatu aspek yang penting guna mewujudkan kemandirian masyarakat. Untuk memenuhi keinginan tersebut maka diperlukan suatu kegiatan pengembangan kemampuan.

Soetomo (2015: 88) menyatakan bahwa unsur utama yang ada dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Sejalan dengan upaya untuk memberdayakan masyarakat, maka diperlukan suatu upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat, berupa penambahan atau pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta sikap supaya masyarakat memiliki

pertimbangan-pertimbangan yang luas dalam menentukan sebuah keputusan yang tepat untuk perbaikan kearah yang lebih baik.

Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi program kerajinan tenun dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Gamplong. Tujuan evaluasi ini untuk menentukan apakah program kerajinan tenun sudah berhasil atau belum dan apakah program kerajinan tenun dapat dilanjutkan atau tidak untuk itu diperlukan analisis evaluasi.

b. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Proses penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat tidak bisa dengan serta merta dilakukan. Perlu prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan program. Nijati et.al (2005: 54) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding

masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Kebermanfaatan merupakan salah satu daya tarik masyarakat lain agar memiliki kesadaran dan mau berpartisipasi. Program yang diberikan kepada masyarakat haruslah kontekstual artinya sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan masyarakat setempat, atau kita berangkat dari potensi atau aktivitas rutin mereka. Ketika program yang dilaksanakan sesuai dengan konteks masyarakat setempat, maka masyarakat lebih mudah dalam pembelajaran dan pemberdayaan karena sudah mengakar di dalam diri masyarakat.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi menyelesaikan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan diri mereka sendiri.

Tujuan pemberdayaan masyarakat ialah demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Totok & Poerwoko (2017: 202)

menyebutkan bahwa ada beberapa tujuan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1) Perbaikan Pendidikan (*Better Education*)

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Peranan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, baik individu maupun sebagai anggota masyarakat merupakan keluaran dari sistem dan fungsi pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia baik individu maupun sosial. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan.

Pendidikan menjadi faktor utama keberhasilan individu atau masyarakat, melalui pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan dapat menjadi landasan dalam menentukan sikap atau tindakan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

2) Perbaikan Usaha (*Better Business*).

Usaha sebagai alternatif agar lebih mandiri perlu diperhatikan, dengan adanya bekal pendidikan dan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat. Perbaikan ini perlu dilakukan karena pendidikan dan keterampilan akan menjadi bekal masyarakat untuk membenahi, memperbaiki, dan mengembangkan usahanya.

3) Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Adanya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. Pendapatan akan dipengaruhi oleh kemampuan manajemen, sehingga peran pendidikan dalam memberikan pengetahuan manajemen menjadi sangat penting. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi namun tidak memiliki kemampuan manajemen yang baik juga akan menimbulkan banyak permasalahan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam manajemen suatu bisnis atau usaha yang ditekuni oleh masyarakat.

4) Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Ketika lingkungan terjaga dengan baik, maka akan tercipta keseimbangan alam di lingkungan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan, sehingga lembaga berperan penting dalam mengawasi kondisi alam agar lingkungan tetap terjaga demi keberlanjutan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

5) Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan merupakan cita-cita dan harapan seluruh masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik diperlukan solusi agar masyarakat memperoleh keberdayaan, perbaikan pendidikan, kelembagaan, usaha, lingkungan, dan pendapatan merupakan cara untuk sampai pada keberdayaan sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

6) Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Tujuan pemberdayaan masyarakat yang utamanya ialah terciptanya perbaikan masyarakat yang dilihat dari tatanan pendidikan, usaha, pendapatan, lingkungan, dan kehidupan di dalam kehidupan masyarakat.

d. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap seperti yang dikemukakan oleh Sulistyani (2004:83). Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasamemburuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

Berdasarkan hal tersebut Pranarka & Moeljarto (1996: 37-38) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat, meliputi: (1) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan. (2) Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskia dalam mengarahkan aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya. (3) Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan sentralistik. (4) Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling

berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi. (5) Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, lokal dan sebagainya, yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya setempat.

e. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menuntut para pengembangan masyarakat untuk berpikir secara sistemik dan komprehensif supaya tidak terjadi kegagalan pada saat penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan strategi dan langkah-langkah yang matang. Berdasarkan pendapat Totok & Poerwoko (2017: 123) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan strategi, yaitu: (1) Susun instrumen pengumpulan data, informasi dalam bentuk hasil penyelidikan lapangan, rujukan yang tersedia, penemuan lapangan; (2) Membina pemahaman, komitmen untuk menggalakkan kebebasan individu dan masyarakat; (3) Menyediakan sistem informasi, membangun sistem analisis, intervensi, pemantauan dan penilaian pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Hasil penelitian Otaya et.al (2019: 59) menyatakan bahwa untuk pengembangan kelompok pengrajin diperlukan adanya pembinaan secara berkala dan pemberian modal usaha secara merata kepada semua kelompok

pengrajin ibu rumah tangga miskin, mempatenkan hasil karya dan menggalakkan kecintaan masyarakat terhadap kerajinan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka untuk mewujudkan pengembangan pada program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong diperlukan adanya pembinaan yang berlangsung secara berkala dan adanya bantuan/pinjaman modal kepada pengerajin tenun dan UKM kerajinan tenun sebagai pelaksana produksi kerajinan tenun.

Faktor keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh langkah-langkah dalam menentukan keputusan dan strategi apa yang akan digunakan. Informasi menjadi faktor penting untuk menentukan keputusan dalam menentukan program. Pemberdayaan sebagai suatu perubahan yang terencana Totok & Poewoko (2017: 123) menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) *Penyadaran*, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberadaanya, baik keberadaanya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkunganya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
- 2) *Menunjukkan, adanya masalah*, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan : keadaan sumberdaya (alam, manusia sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, dan politis.
- 3) *Membantu pemecahan masalah*, analisis akar-masalah analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat

dilakukan sesuai kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang, ancaman) yang dihadapi.

- 4) *Menunjukkan pentingnya perubahan*, yang akan dan sedang terjadi dilingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global).
- 5) *Melakukan pengujian dan demonstrasi*, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan.
- 6) *Memproduksi dan publikasi informasi*, baik yang berasal dari luar (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain).
- 7) *Melaksanakan pemberdayaan/atau penguatan kapasitas*, yaitu pemberian kesempatan pada kelompok lapisan bawah (*grassroot*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan, serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung-gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.

f. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Menentukan keberdayaan atau tidak keberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator. Totok & Poerwoko (2017:289) menyebutkan bahwa beberapa indikator keberdayaan masyarakat yaitu: (1) menegaskan bahwa keberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh kemandirian masyarakat, (2) kemampuan masyarakat secara sadar dalam menentukan

pilihan sendiri, (3) masyarakat sudah mampu kebutuhan pokok dengan hasil pendapatan sendiri, (4) masyarakat dapat memanajemen perekonomian rumah tangga, dan (5) mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

g. Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal secara umum berfungsi sebagai pelengkap, penambah, pengganti materi-materi yang ada pada pendidikan formal. Dalam pendidikan nonformal, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan pembelajaran bagi masyarakat yang esensinya masyarakat dapat berdaya atas kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Selain itu, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dari diri dan lingkungan sekitar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Folley bahwasanya tujuan pendidikan nonformal, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan kognitif individu dengan pemberian ilmu pengetahuan yang bermakna, (2) mengembangkan kualitas diri dan beraktualisasi, (3) memelihara sifat demokratis yang tinggi kepada masyarakat dan menumbuhkan karakter individu yang bebas sehingga terwujud demokrasi yang sehat, (4) mempertahankan atau merubah tatanan sosial yakni pendidikan dijadikan alat untuk melakukan sebuah transformasi sosial, (5) mencapai keefektifan organisasi yakni pendidikan dinilai sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan dan menumbuhkan sikap yang dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif (Suryono, 2014: 20).

Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan bersinergi dengan pemerintah pusat/daerah maupun pihak ketiga seharusnya

memiliki tujuan pendidikan nonformal. Dilakukannya pemberdayaan masyarakat dengan objek sasaran adalah masyarakat maka diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Artinya, solusi tersebut akan bersifat efektif dan tepat sasaran. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan agar dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Pendidikan nonformal akan membentuk budaya dan sikap demokratis yang sehat di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat akan memiliki makna ganda, yaitu sebagai upaya membentuk kehidupan masyarakat yang lebih baik juga sebagai usaha mengembangkan wawasan masyarakat dan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pendidikan nonformal tentu akan berkaitan dengan konsep pendidikan orang dewasa walaupun secara struktur masyarakat terdiri atas linas generasi dan umur. Namun, tidak dapat dipungkiri terkait pembicaraan mengenai masyarakat tidak bisa lepas dari intervensi orang dewasa yang menjadi objek penilaian apakah berkompeten dalam mengelola dan memenejemen lingkungan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh La Belle bahwasanya pendidikan orang dewasa dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas individu dan sosial. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan kualitas meliputi, yaitu: kegiatan pendidikan moral, pendidikan kesenian, pemecahan masalah, pemanfaatan waktu luang dan literasi (Suryono, 2014: 24).

Konteks pemberdayaan masyarakat, maka hendaknya kegiatan-kegiatan pemberdayaan dilakukan sekaligus untuk membentuk moral

masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu mengarahkan masyarakat pada pemikiran objektif sehingga dapat memecahkan permasalahan sendiri maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang pendidikan nonformal juga tidak akan terlepas dari konsep inovasi. Pemberdayaan masyarakat memiliki sifat secara umum yaitu masyarakat dapat ikut berperan dan berkontribusi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Harapannya akan terbentuk kehidupan yang lebih baik dan tidak lepas dari upaya inovatif. Oslo mengatakan bahwa inovasi mengandung tiga aspek, yaitu: kebermaknaan, kebermanfaatan dan kekompleksan (Suryono, 2014: 27).

Berdasarkan konsep inovatif maka pemberdayaan masyarakat dilakukan di suatu daerah dapat memenuhi tiga aspek tersebut. Inovasi yang dilakukan harus memiliki kebermaknaan bukan hanya mengubah tatanan maupun sekedar memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan harus mengandung kebermanfaatan dalam jangka pendek dan panjang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat harus menjangkau setiap lapisan dan sektor dengan terintegrasi pada bidang lain. Artinya, pemberdayaan masyarakat bersifat komprehensif.

Pada konteks pendidikan nonformal, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendekatan struktural. Pendidikan struktural diartikan sebagai proses penyampaian inovasi kelompok sasaran agar dapat menggunakan inovasi (Suryono, 2014: 28). Pemberdayaan masyarakat dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan organisasi yang terdapat pada

lingkungan masyarakat. Organisasi berfungsi sebagai transformator kepada masyarakat terkait pemahaman atas program pemberdayaan yang akan dilakukan. Dalam istilah lain proses pemberdayaan masyarakat melibatkan organisasi masyarakat sendiri disebut model *bottom-up*.

Suryono (2014: 34) mengungkapkan bahwa penggunaan pendekatan struktural memiliki beberapa kelebihan karena lebih tepat diterapkan pada masyarakat yang memiliki sikap keterbukaan yang baik terhadap hal baru. Hal tersebutlah yang akan menjadi standar keberhasilan yang dicapai. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini akan lebih tepat diterapkan pada masyarakat kontemporer walaupun tidak menutup kemungkinan juga diterapkan pada masyarakat konservatif.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Panca (2015: 1). Penelitian ini dilakukan di Kertalangu Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu ditinjau dari aspek konteks, masukan, proses, dan produk masih belum berjalan dengan optimal. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu manajemen pengelolaan yang belum optimal, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan potensi wisata dan belum adanya koordinasi yang baik antar pihak pengelola dan antara pihak pengelola dengan pihak Desa Kesiman Kertalangu. Dampak pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Kertalangu ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan menyatakan bahwa pengembangan Desa Budaya Kertalangu sudah menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan namun perlu dioptimalkan

lagi. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya pihak pengelola untuk melakukan upaya agar mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Desa Budaya Kertalangu dan pemerintah diharapkan memberikan insentif dan kemudahan dari sisi regulasi. Pada saat yang sama, partisipasi masyarakat agar lebih ditingkatkan sehingga mereka memiliki sikap positif terhadap pengembangan Desa Budaya Kertalangu. Selain itu, antarpihak pengelola maupun antara pengelola dengan pihak Desa Kesiman Kertalangu menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif sehingga terdapat persepsi yang sama terhadap pengembangan Desa Budaya Kertalangu.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek atau sasaran penelitian dan fokus penelitian. Dari hasil penelitian di atas memberikan sumbangan kepada peneliti yaitu dalam melakukan kajian analisis mengenai evaluasi program dengan menggunakan evaluasi model CIPP. Selain itu, memberikan gambaran bahwa dalam melakukan penelitian evaluasi tentunya tidak terlepas dengan rekomendasi apa yang peneliti berikan kepada masyarakat terutama di lokasi penelitian dalam rangka mengembangkan Desa Wisata Gamplong.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2016: 1). Lokasi penelitian ini berada di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program OVOP (*One Village One Product*) di Desa Pelaga sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari sisi konteks yang menunjukkan bahwa tujuan program ini sesuai dengan keadaan yang diperlukan pada Desa Pelaga dengan melihat kondisi lingkungan dan

komitmen pemerintah serta mempertimbangan kekuatan dan kelemahan sasaran program. Berdasarkan sisi masukan (*input*), hasil analisis menunjukkan sumber daya manusia yang ada masih memerlukan pembinaan berkelanjutan, sedangkan anggaran yang diperoleh telah tercukupi begitu pula dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada sudah memadai dan mendukung pelaksanaan program ini. Dari sisi proses, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan program mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan telah sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, dari sisi produk menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan program telah sesuai dengan yang diharapkan. Kesesuaian ini dilihat dari terbentuknya Koperasi Tani Mertanadi sebagai badan hukum penguatan keberadaan petani, kemampuan petani menanam varietas unggulan berupa sayuran asparagus, menciptakan kemandirian petani serta adanya peningkatan pendapatan petani asparagus daripada sebelumnya bertani tanaman tradisional.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut sebagai berikut: (a) kesulitan untuk mengubah mindset petani tradisional ke petani modern. Masih ada petani yang belum bisa mengubah *mindset* berpikirnya tentang pola bertani tradisional yang cenderung lebih mudah daripada pola bertani asparagus, (b) pesimistis petani akibat pengalaman kegagalan akan program sebelumnya. Pengalaman kegagalan program sebelumnya yang membuat petani pesimis akan program baru, dan (c) cuaca ekstrem yang masih sulit diantisipasi oleh petani asparagus.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek atau sasaran penelitian dan

fokus penelitian dan metode yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas memberikan sumbangan peneliti yaitu dalam melakukan kajian analisis mengenai evaluasi program dengan menggunakan evaluasi model CIPP. Evaluasi program dalam penelitian ini mengenai evaluasi program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah (2017: 1). Lokasi penelitian dilakukan di MI Ma'Arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut: 1) komponen konteks (*context*), perumusan visi, misi, dan tujuan program pengembangan profesionalisme guru sudah kategori baik. Sedikit catatan pada perumusan visi dimana perumusan misi masih kurang sempurna, karena visi dari pelaksanaan program pengembangan profesionalisme guru merupakan implementasi dari visi dan misi madrasah yang mengacu pada program tahunan dan Renstra Madrasah. 2) Komponen masukan (*input*), menunjukkan bahwa *input* tim, guru, kurikulum serta sarana dan prasarana sudah kategori baik. Sedikit catatan pada *input* sarana dan prasarana masih perlu adanya peninjauan terkait pengembangan profesionalisme guru. 3) Komponen proses (*process*), penggunaan metode, media, materi, dan waktu pembelajaran dalam pengembangan profesionalisme guru sudah kategori baik. Sementara untuk waktu pengembangan profesionalisme guru perlu dioptimalkan. 4) Komponen produk (*product*) sudah kategori baik. Pencapaian program pengembangan profesionalisme guru sudah sesuai target yang ditetapkan oleh madrasah. Program yang dibuat oleh tim pengembangan profesionalisme guru

sangat efektif untuk memantau dan mengukur keberhasilan program yang dibuat oleh tim pengembangan profesionalisme guru.

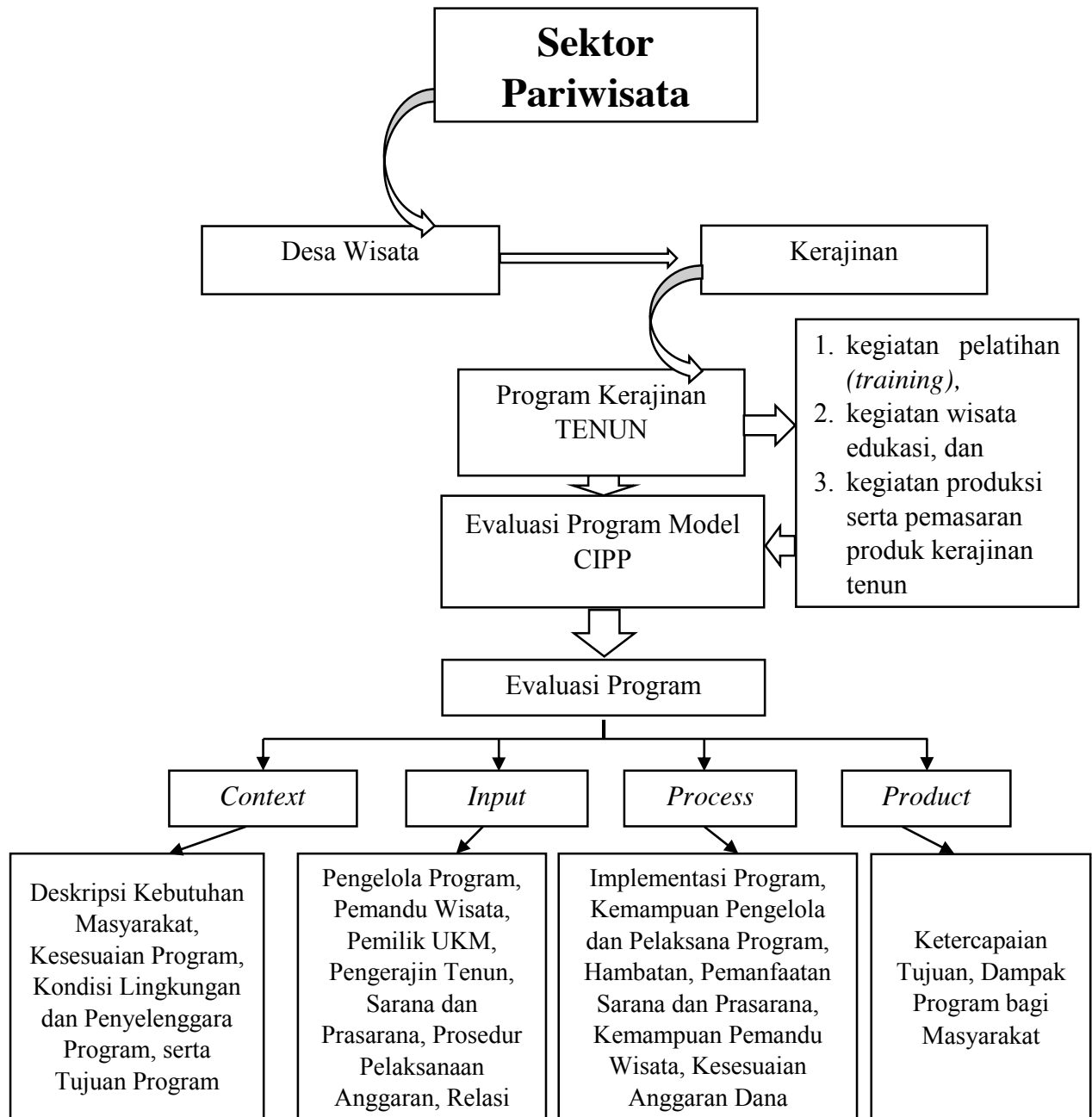
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada lokasi penelitian, subjek atau sasaran penelitian dan fokus penelitian. Dari hasil penelitian di atas memberikan sumbangan kepada peneliti yaitu dalam melakukan kajian analisis mengenai evaluasi program dengan menggunakan evaluasi model CIPP. Selain itu, membarikan gambaran atau acuan dalam mengukur dan menilai tingkat keberhasilan program.

C. Alur Pikir

Sektor Pariwisata terdiri dari wisata bahari dan wisata alam. Wisata bahari identik dengan wisata pantai, sedangkan wisata alam identik dengan keasrian alam. Desa wisata merupakan jenis wisata alam yang menawarkan keaslian tradisi, adat istiadat, budaya, arsitektur, kerajinan khas dan lain-lain. Sebuah desa wisata tentunya tidak terlepas dari program-program yang ditawarkan kepada pengunjung wisata. Desa Wisata Gamplong merupakan desa wisata jenis kerajinan yang memiliki bermacam program. Program di Desa Wisata Gamplong ada 5 (lima) jenis program, yaitu program kerajinan tenun, program kerajinan cenderamata, program kuliner, program mebel, dan program pelatihan kerajinan. Program yang menjadi unggulan di Desa Wisata Gamplong ini ialah program kerajinan tenun. Kemudian, untuk menentukan tingkat keberhasilan, keefektifan dan keefisienan program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong maka dilakukan analisis evaluasi program.

Evaluasi program ini digunakan dengan tujuan untuk melihat seberapa baik tingkat keberhasilan dan kegagalan program, mengetahui tingkat kesulitan program, mengetahui tingkat keefektivan dan keefesienan program, serta menentukan apakah program kerajinan tenun dapat dilanjutkan, dimodifikasi atau diberhentikan. Evaluasi program yang dilakukan dalam penelitian ini adalah evaluasi program menggunakan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Danniell Stufflebeam. Evaluasi program model CIPP dipilih berdasarkan pertimbangan karena evaluasi program kerajinan tenun di Desa Wisata Gamplong ini analisis secara menyeluruh/komprehensif, mendasar, dan terpadu terkait dengan konteks program, masukan program, proses program dan hasil dari program kerajinan tenun

Selanjutnya alur pikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar. 1 Alur pikir evaluasi program kerajinan tenun dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Gampong

D. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi program evaluasi model CIPP yang diperkenalkan oleh Stufflebeam yang terdiri dari 4 (empat) aspek yang dievaluasi yaitu *konteks* (konteks), *input* (masukan), *process* (proses), dan *product* (hasil). Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam bab I maka di dalam pertanyaan penelitian ini akan diuraikan ke dalam empat aspek evaluasi tersebut, yaitu:

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)
 - a. Apakah program sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
 - b. Apakah kondisi lingkungan sudah sesuai dengan program?
 - c. Apa yang menjadi tujuan program?
2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)
 - a. Bagaimana latar belakang pengelola program?
 - b. Bagaimana latar belakang pemandu wisata?
 - c. Bagaimana latar belakang pemilik UKM?
 - d. Bagaimana latar belakang pengerajin tenun?
 - e. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana program?
 - f. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah mencapai tujuan program?
 - g. Pihak mana saja yang terlibat ketika menyelenggarakan program?
 - h. Bagaimana bentuk dan pengelolaan anggaran dana program?
3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)
 - a. Apakah program kerajinan tenun terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak?

- b. Apakah pengelola dan pelaksana mampu melaksanakan program sesuai jadwal, seperti yang direncanakan dan efisien?
- c. Apakah anggaran dana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan program?
- d. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami selama pelaksanaan program?
- e. Bagaimana kemampuan pemandu wisata pada saat pelaksanaan kegiatan wisata edukasi kerajinan tenun?
- f. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan sudah dimanfaatkan secara maksimal?

4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

- a. Apakah tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai?
- b. Apa dampak yang dirasakan masyarakat dari hasil program kerajinan tenun?